KEMENTERIAN KEUANGAN RI					
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					

THT9M2U3

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

H.1   NOMOR   :   2 0 0 0 0 1 0 8 1				H.4 X	H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 6 9 5 4 7 6 0 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARI JUMADI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
3 21-402-01	1.003.500	1.003.500	0	5	50.175		
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :  C.2 Nama Instansi Pemerintah :  C.3 ID Subunit Organisasi :  C.4 Tanggal :  C.5 Nama Penandatangan :  C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	1 6 dd 0 3 mm  HARI JUMADI  Dengan ini saya menyatakan ba	1 6 2 7 2 2  RAH ATMA HUSADA MAHAK  2 0 2 2 yyyy  ahwa bukti Pemotongan/Pemungut			]		
tandatangani secara elektronik.  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							